

**Pengaruh Aset dan Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan**

Dinna Adelima

Politeknik Negeri Sriwijaya
dinnaadelima58@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of assets and audit opinion on the level of disclosure of government financial statements in South Sumatra province in 2019-2021. The population of this study was 13 districts and 4 cities in South Sumatra province and this study used saturated sampling, so that the entire population became the research sample. This research data uses secondary data obtained from the official website of the Audit Board of Republic Indonesia. The analysis model of this study is multiple linear analysis with the help of SPSS program version 25. The results of this study can be concluded that: (1) assets have a significant effect on the level of disclosure of financial statements of district/city governments in South Sumatra province; (2) audit opinions do not have a significant effect on the level of disclosure of financial statements of district/city governments in South Sumatra province; (3) assets and audit opinion simultaneously have a significant effect on the level of disclosure of financial statements of district/city governments in South Sumatra province.

Keywords: *Assets, Audit Opinion, the Level of Disclosure of Local Government Financial Statements.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aset dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah di provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2021. Populasi penelitian ini adalah 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan dan penelitian ini menggunakan sampling jenuh sehingga seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *website* resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Model analisis penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) aset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan; (2) opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan; (3) aset daerah dan opini audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Aset, Opini Audit, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus segera disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Kemudian, pemeriksa keuangan akan memberikan hasil opini. Opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah terbagi menjadi empat yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer Opinion*), dan Tidak Wajar (*TW/Adverse Opinion*). Laporan keuangan yang telah diaudit dan diberikan opini oleh BPK disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD. Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dan transparansi, laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan pada lembaga perwakilan dapat terbuka untuk masyarakat umum (bpk.go.id).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022, BPK telah memeriksa 541 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 dari 542 Pemerintah daerah (Pemda). Dari 542 Pemda, 1 Pemda yang belum menyampaikan LKPD tahun 2021 kepada BPK untuk diperiksa, 3 Pemda memperoleh opini TMP, 38 Pemda yang memperoleh opini WDP, dan 500 Pemda yang memperoleh opini WTP. Opini WTP yang diberikan BPK kepada pemerintah daerah meningkat sebesar 16,4%. Sedangkan, pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP, TW, dan TMP mengalami penurunan setiap tahunnya.

Pada tahun 2021 ICW mencatat setidaknya 533 kasus korupsi dengan 1.173 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka serta potensi kerugian negaranya mencapai Rp29,438 triliun. Lembaga terbanyak yang menjadi tempat korupsi yaitu pemerintah daerah dalam penyalahgunaan anggaran. Seharusnya pemerintah yang telah memperoleh opini WTP terbebas dari salah saji material pada pengungkapan laporan keuangannya. Hal ini dapat diartikan bahwa pengungkapan yang dilakukan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam SAP yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Apakah Aset berpengaruh secara parsial pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Opini Audit berpengaruh secara parsial pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Aset Daerah dan Opini Audit memberi pengaruh dengan bersamaan pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Aset terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Aset dan Opini Audi secara bersama-sama terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Studi Kepustakaan

Teori Stewardship

Teori *stewardship* dalam Sudaryo dkk. (2017), "Teori *stewardship* adalah situasi dimana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi namun lebih mementingkan keinginan prinsipal". Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidak mempunyai motivasi terhadap tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada kepentingan organisasi.

Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan jika Standar Akuntansi Pemerintah ialah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah dinyatakan pada wujud PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) dan susunannya merujuk pada sebuah dasar yakni kerangka konseptual pada akuntansi pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ditinjau pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintah daerah wajib membuat susunan laporan keuangan menjadi wujud pertanggungjawaban terhadap publik ataupun organisasi yang memiliki wewenang untuk penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Laporan keuangannya berupa: (1) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (2) Laporan Realisasi Anggaran; (3) Laporan Operasional; (4) Neraca; (5) Laporan Perubahan Ekuitas; (6) Laporan Arus Kas; (7) CaLK/Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Disclosure (Pengungkapan) memiliki definisi tidak menyembunyikan ataupun menutupi. Pemerintah pusat ataupun daerah wajib menyampaikan pengungkapan informasi pada laporan keuangannya dan merujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Informasi tersebut di tempatkan pada Catatan atas Laporan Keuangan ataupun dilembar muka laporan keuangan.

Aset

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Aset merupakan sumber daya ekonomi dan posisinya di bawah penguasaan atau kepemilikan pemerintah yang merupakan hasil dari peristiwa lalu dan diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan baik bagi pemerintah maupun masyarakat, dan dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan sumber daya yang dilestarikan karena alasan sejarah dan budaya.

Opini Audit

Opini merupakan pernyataan secara profesional bagi pemeriksa mengenai kewajaran suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu menghasilkan kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPRD/DPD untuk ditindaklanjuti, antara lain dengan memahaminya bersama dengan para pemangku kepentingan (bpk.go.id).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan populasi 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, dimana semua populasi akan dijadikan sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda dengan bantuan program SPSS versi 25. Variabel independen penelitian terdiri dari aset dan opini audit, sedangkan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Tabel 1 di bawah ini menjelaskan operasional variabel yaitu:

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
Tingkat Pengungkapan LKPD (Y)	$DISC = \frac{\text{Pengungkapan dalam LKPD}}{\text{Pengungkapan dalam SAP}}$	Rasio
Aset Daerah (X1)	$ASD = \ln \text{ Total Aset}$	Rasio
Opini Audit (X2)	OP = WTP (4); WDP (3); TW (2); TMP (1)	Nominal

Hipotesis

H1: Aset berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

H2 : Opini Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

H3 : Aset dan Opini Audit berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

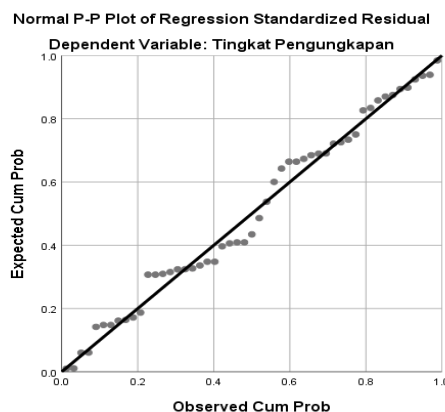
Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan simpangan baku dari variabel independen dan variabel dependen. Hasil statistik ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Aset	51	28.33	30.55	28.9359	.52847
Opini Audit	51	3.00	4.00	3.9608	.19604
Tingkat Pengungkapan	51	.36	.51	.4404	.03156
Valid N (listwise)	51				

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menggambarkan apakah dalam suatu model regresi, variabel residual atau pengganggu berdistribusi normal. Pada penelitian ini menggunakan *Normal P-P Plot*. Penelitian ini diperoleh hasil uji normalitas yang ditunjukkan pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Normal P-P Plot

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat ada titik titik-titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi

pada penelitian berdistribusi normal, sehingga data yang digunakan dapat dilakukan uji selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antar variabel bebas di model regresi. Salah satu cara untuk melihat hal tersebut, dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF yang dihasilkan oleh variabel bebas. Nilai *cutoff* yang biasa dipakai dalam memperlihatkan terdapatnya multikolinieritas adalah = nilai *tolerance* $\leq 0,10$ ataupun nilai VIF ≥ 10 . Hasil uji multikolinieritas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Coefficients^a

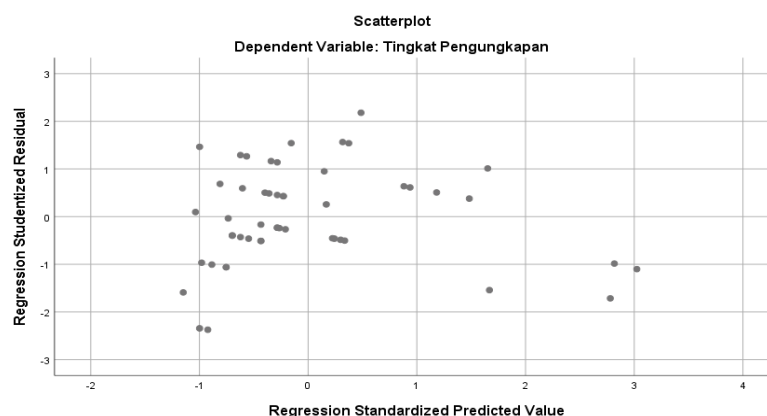
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.238	.253		-.941	.352		
	Aset	.024	.008	.400	3.012	.004	.989	1.011
	Opini Audit	-.003	.021	-.021	-.155	.878	.989	1.011

Dependent Variable: Tingkat Pengungkapan

Berdasarkan tabel 4, nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamat ke pengamat yang lain. Terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas dilihat dari pola *scatterplot*. Apabila ada pola tertentu, titik-titik yang berbentuk pola beraturan maka terjadi heteroskedastisitas. Apabila polanya tidak jelas, titik-titik menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa titik-titik pada pola *scatterplot* tidak membentuk pola yang jelas. Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW). Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.403 ^a	.162	.127	.02948	1.028

a. *Predictors:* (Constant), Opini Audit, Aset

b. *Dependent Variable:* Tingkat Pengungkapan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 4 terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 1,028. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,028 terletak di antara -2 sampai +2 yang berarti model regresi tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.238	.253		-.941	.352
	Aset	.024	.008	.400	3.012	.004
	Opini Audit	-.003	.021	-.021	-.155	.878

a. *Dependent Variable:* Tingkat Pengungkapan

Didasari dari hasil tabel 5 diperoleh persamaan regresi linier bergandanya sebagai berikut:

$$Y = -0,238 + 0,024X_1 - 0,003X_2 + e$$

Berikut ini penjabaran dari persamaan regresi di atas:

1. Nilai konstanta (a) sebesar -0,238 menunjukkan bahwa nilai variabel aset dan opini audit bernilai 0, maka tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar -0,238.

2. Nilai koefisien aset daerah (b_1) sebesar 0,024 menunjukkan bahwa setiap kenaikan aset daerah sebesar satu satuan maka akan meningkatkan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar 0,024.
3. Nilai koefisien opini audit (b_2) sebesar -0,003 menunjukkan bahwa setiap kenaikan opini audit sebesar satu satuan maka akan menurunkan tingkat pengungkapan laporan keuangan sebesar 0,003.

Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-.238	.253		-.941	.352
	Aset	.024	.008	.400	3.012	.004
	Opini Audit	-.003	.021	-.021	-.155	.878

a. *Dependent Variable:* Tingkat Pengungkapan

Berdasarkan tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pada uji t diketahui bahwa variabel aset memperoleh nilai t hitung sebesar 3.012. Nilai tersebut lebih besar dari t tabel ($3,012 > 1,67722$) dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004, dimana nilai ini menunjukkan bahwa $0,004 < 0,05$. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa secara parsial aset berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Hal ini berarti semakin besar aset yang dimiliki pemerintah, semakin besar juga tuntutan pemerintah untuk melakukan pengungkapan atas laporannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2018).
2. Hasil pengujian hipotesis pada uji t diketahui bahwa variabel opini audit memperoleh nilai t hitung sebesar -0,155. Nilai tersebut lebih kecil dari t tabel ($-0,155 < 1,67722$) dan nilai signifikansi sebesar 0,878, dimana nilai ini menunjukkan bahwa $0,878 > 0,05$. Hasil uji t tersebut menunjukkan bahwa secara parsial opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Ketika suatu pemerintah daerah telah memperoleh opini yang baik, pemerintah daerah akan merasa puas atas pengungkapan yang telah dilakukan. Sehingga semakin baik opini yang diperoleh tidak mempengaruhi pemerintah untuk meningkatkan pengungkapan atas laporannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Sulardi (2019).

Uji F (Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.008	2	.004	4.646	.014 ^b
	Residual	.042	48	.001		
	Total	.050	50			

a. *Dependent Variable:* Tingkat Pengungkapan

b. *Predictors:* (Constant), Opini Audit, Aset

Didasari dari tabel 7 diketahui bahwa aset dan opini audit memperoleh nilai F hitung sebesar 4,646. Nilai tersebut lebih besar dari F tabel ($4,646 > 3,19$) dan nilai signifikansi yang diperoleh variabel aset dan opini audit sebesar 0,014, dimana nilai ini menunjukkan bahwa $0,014 < 0,05$. Hasil uji F tersebut menunjukkan bahwa secara simultan aset dan opini audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.403 ^a	.162	.127	.02948	1.028

a. *Predictors:* (Constant), Opini Audit, Aset

b. *Dependent Variable:* Tingkat Pengungkapan

Berdasarkan tabel 8, uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,127. Hal ini berarti hanya 12,7% variabel tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel aset dan opini audit. Sisanya 87,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di olah, jadi peneliti menyimpulkan jika penelitian yang dilaksanakan menunjukkan bahwa aset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan, opini audit tidak berpengaruh signifikan

terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aset dan opini audit berpengaruh secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Saran

Penelitian selanjutnya sebaiknya menganalisis pengungkapan secara menyeluruh baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela, menambah variabel independen yang lain, menggunakan sampel yang lebih luas dan menggunakan data laporan keuangan pemerintah daerah dalam pengamatan yang lebih panjang.

DAFTAR PUSTAKA

_____. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022*.
<https://www.bpk.go.id/ihps>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Badan Pemeriksa Republik Indonesia. (2020). *Ragam Opini BPK*.
<https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Indonesia Corruption Watch (ICW) (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi 2021*. <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Tren%20Penindakan%20Kasus%20Korupsi%20Tahun%202021.pdf>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N.A., & Christian, P. (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta:ANDI.